



Implementasi Kebijakan KBRI bagi Stateless Child dalam Menumbuh Kembangkan Literasi Dasar pada Sanggar Bimbingan Sungai Mulia Malaysia

Nazla Dara Dinantika^{1*}; Franindya Purwaningtyas¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail korespondensi: nazla0601211002@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Indonesian Embassy (KBRI) policy in supporting the education of stateless children in Malaysia through a basic literacy program at Sanggar Bimbel Sungai Mulia. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through interviews, observations, and documentation. This study aims to explore learning strategies, media use, and the role of volunteers and supporting institutions in creating an inclusive learning environment. Basic literacy includes reading, writing, and arithmetic (calistung) as the foundation for further education. The results of the study indicate that an interactive and empathetic learning approach can improve students' self-confidence, social skills, and academic abilities. Obstacles such as lack of teachers and limited infrastructure are overcome through collaboration between the Indonesian Embassy, Atdikbud, volunteers, and the community. This program reflects the state's commitment to vulnerable groups and contributes to the development of sustainable and equitable non-formal education.

Keywords: *stateless child; basic literacy; non-formal education; embassy; guidance center*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam mendukung pendidikan anak-anak tanpa kewarganegaraan di Malaysia melalui program literasi dasar di Sanggar Bimbel Sungai Mulia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi pembelajaran, penggunaan media, serta peran relawan dan lembaga pendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Literasi dasar meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai fondasi pendidikan lanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang interaktif dan empatik mampu meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan kemampuan akademis siswa. Kendala seperti kurangnya tenaga pengajar dan keterbatasan infrastruktur diatasi melalui kolaborasi antara KBRI, Atdikbud, relawan, dan masyarakat. Program ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan nonformal yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: *anak tanpa kewarganegaraan; keaksaraan dasar; pendidikan non-formal; kedutaan besar; pusat bimbingan*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap individu yang harus dijamin tanpa diskriminasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak kelompok yang tidak dapat menikmati hak tersebut, salah satunya adalah *stateless child* di Malaysia. Berdasarkan data UNHCR, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 12.400 anak tanpa kewarganegaraan di Malaysia, dan sebagian besar di antaranya

adalah anak-anak migran Indonesia yang lahir di Malaysia namun tidak tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan negara manapun (Hasanah & Silitonga, 2020). *Stateless child* sendiri didefinisikan oleh UNHCR sebagai “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasional (Rozi et al., 2024). *Stateless child* merujuk pada anak-anak yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun, sehingga mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang sah. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktercataan kelahiran, status orang tua yang tidak memiliki dokumen resmi, atau kebijakan kewarganegaraan yang ketat. Akibat dari status mereka, *stateless child* sering mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal karena tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah. Tanpa akses pendidikan yang memadai, anak-anak ini cenderung mengalami kesulitan dalam meningkatkan keterampilan literasi mereka, yang berimplikasi pada masa depan mereka dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik (Asia-pacific, n.d.)

Dalam konteks penelitian ini, rentang usia *stateless child* yang menjadi fokus adalah 6–15 tahun, yaitu kelompok usia sekolah dasar hingga menengah pertama, sesuai dengan batasan usia wajib belajar dan sasaran utama program literasi dasar yang dilaksanakan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia (UNHCR, 2021). Anak-anak dalam rentang usia ini sangat rentan mengalami keterbatasan akses pendidikan formal akibat ketiadaan dokumen kewarganegaraan, sehingga mereka hanya dapat mengakses pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga swadaya masyarakat. Keterbatasan akses pendidikan formal bagi *stateless child* di Malaysia telah menjadi perhatian internasional, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 4 tentang pendidikan berkualitas. Studi UNICEF (2022) menegaskan bahwa anak-anak tanpa kewarganegaraan menghadapi risiko lebih tinggi untuk mengalami putus sekolah, rendahnya keterampilan literasi, serta terbatasnya kesempatan ekonomi di masa depan (UNHCR, 2023). Untuk mengatasi masalah ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) bersama Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) telah menginisiasi pendirian Sanggar Bimbingan Sungai Mulia sebagai bentuk implementasi kebijakan perlindungan pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia yang berstatus *stateless* di Malaysia. Program literasi dasar yang dilaksanakan di sanggar ini tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung), tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, keterampilan sosial, serta literasi informasi yang relevan dengan kebutuhan anak-anak di era digital (UNHCR, 2021). Kurikulum yang digunakan mengacu pada standar nasional Indonesia dan disesuaikan dengan konteks sosial-budaya anak-anak migran di Malaysia, sementara metode pembelajaran mengedepankan pendekatan interaktif dan partisipatif agar anak-anak dapat belajar secara aktif dan menyenangkan.

Sebagai bentuk komitmen global dalam memastikan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam Agenda 2030. Salah satu tujuan utama yang terkait dengan isu ini adalah SDG 4: Pendidikan Berkualitas, yang bertujuan untuk memastikan semua anak memiliki akses ke pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas (Guiraudon, 2005). Target yang relevan dengan anak-anak tanpa identitas meliputi:

1. Target 4.1 : Memastikan bahwa semua anak-anak dan remaja memiliki akses ke pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas

2. Target 5.2 : Mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap anak-anak, termasuk perdagangan anak dan eksploitasi anak
3. Target 16.2: Mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap anak-anak dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke perlindungan sosial yang memadai (HAM, 2016)

Studi kasus dinegara Malaysia, *stateless child* sering kali tidak dapat mengakses pendidikan formal dan terpaksa mengikuti program pendidikan nonformal. *Stateless child* merujuk pada anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sah karena tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun. Berbagai faktor penyebab, seperti kelahiran yang tidak tercatat secara resmi, status kewarganegaraan orang tua yang tidak jelas, atau kebijakan hukum yang membatasi hak kewarganegaraan. Salah satu program pendidikan nonformal yang diterapkan untuk mereka adalah kelas membaca, menulis, dan menghitung (*calistung*). Program ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan keterampilan dasar literasi sebelum memasuki jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka (Rozi, Abda, & Salsabilla, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan nonformal dapat menjadi solusi efektif bagi anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Anak-anak migran tanpa dokumen di Malaysia mendapatkan manfaat besar dari program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh berbagai LSM dan komunitas lokal (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Sementara itu, UNESCO menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan penggunaan media ajar yang interaktif dalam meningkatkan efektivitas program literasi bagi kelompok rentan. (UNESCO, 2022). Pendidikan berkualitas berdasarkan SDGs pada target 4.1 memastikan bahwa memiliki akses pendidikan dasar yang berkualitas, salah satunya literasi dasar pada (*calistung*).

Program literasi merupakan bentuk kontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi *stateless child*, terutama dalam aspek literasi dasar yang menjadi fondasi bagi perkembangan akademik. Program literasi dasar selaras dengan keilmuan dalam program studi Ilmu Perpustakaan yang menekankan pentingnya literasi informasi, akses terhadap sumber belajar, serta peran perpustakaan dalam inklusi sosial. Proses pengajaran dalam kelas (*calistung*) dilakukan dengan pendekatan interaktif yang berbasis pada teori literasi informasi, di mana anak-anak tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga diajarkan keterampilan dasar dalam menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi dengan tepat. Penggunaan berbagai alat bantu ajar seperti buku bergambar, permainan edukatif, serta teknologi digital yang berbasis sumber daya perpustakaan menjadi strategi utama dalam mendukung efektivitas pembelajaran. Metode literasi dirancang agar mereka dapat belajar dengan efektif, mengembangkan kemandirian dalam memperoleh pengetahuan, serta meningkatkan minat mereka terhadap literasi sebagai keterampilan dasar yang akan mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.

Program literasi dasar dirancang untuk berjalan secara berkelanjutan hingga peserta yang mengikutinya mencapai tingkat kompetensi yang sesuai. Pada akhir program, mereka akan mengikuti ujian atau tes yang menentukan apakah mereka telah siap untuk memasuki kelas dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jika mereka belum mencapai standar literasi yang ditetapkan, mereka akan kembali mengikuti kelas (*calistung*) hingga lulus uji kompetensi. Ketika peserta belum mencapai standar, maka wajib mengikuti kembali kelas *calistung* hingga lulus ujian kompetensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi program literasi bagi *stateless child* di Malaysia dirancang, dikembangkan, dan diterapkan. Fokus penelitian adalah strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan nonformal, efektivitas media ajar dalam meningkatkan keterampilan literasi dasar anak, dan keberlanjutan program dalam memastikan peserta memperoleh akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif agar *stateless child* tetap memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta membangun masa depan yang lebih cerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Program SDGs 4 memastikan pendidikan berkualitas, penerapan kebijakan KBRI terhadap anak-anak tanpa kewarganegaraan atau *stateless child* dalam menumbuh kembangkan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan KBRI terhadap anak-anak tanpa kewarganegaraan (*stateless child*). KBRI memiliki peran memastikan berjalannya program SDGs 4, termasuk pendidikan *stateless child* dalam upaya menumbuhkan literasi dasar di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia, Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memahami strategi apa saja yang dapat dilakukan guna meningkatkan literasi dasar pada anak-anak *stateless* tersebut, serta tantangan dan upaya apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program literasi dasar bagi *stateless child* tersebut.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan KBRI dan Atdikbud dalam Mendukung Pendidikan bagi Stateless Child

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memiliki peran yang tidak sekadar administratif, tetapi juga moral dalam memastikan bahwa setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Bersama Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud), KBRI menjalankan mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan dan pelayanan pendidikan kepada WNI, termasuk mereka yang berada dalam posisi rentan seperti anak-anak tanpa kewarganegaraan.

Implementasi nyata dari kebijakan ini terlihat dalam pendirian Sanggar Bimbingan Sungai Mulia, yang berfungsi sebagai ruang belajar bagi anak-anak migran Indonesia di Malaysia yang tidak memiliki akses ke sekolah formal. Sanggar ini menjadi tempat belajar yang memberi harapan bagi anak-anak yang terpinggirkan karena tidak memiliki identitas resmi dan terbatas oleh aturan hukum. Anak-anak belajar membaca, menulis, berhitung, serta mengenal budaya dan jati diri bangsa melalui pendekatan yang menyenangkan, interaktif, dan inklusif. Kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan standar nasional Indonesia, namun tetap relevan dengan konteks kehidupan mereka di Malaysia.

Peran Atdikbud dalam menyusun kurikulum, memfasilitasi pelatihan relawan, serta membangun jejaring kerja sama dengan organisasi lokal dan internasional menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program ini. KBRI dan Atdikbud juga menyediakan program beasiswa, bantuan pembelajaran digital, serta materi ajar yang dapat diakses dari berbagai wilayah terpencil.

Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu anak pun yang tertinggal dari hak dasarnya untuk belajar dan berkembang.

Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Tantangan utama terletak pada keterbatasan tenaga pengajar, minimnya sarana dan prasarana pendidikan, serta belum adanya pengakuan resmi dari pemerintah Malaysia terhadap lembaga pendidikan nonformal ini (Hasanah & Silitonga, 2020). Di samping itu, kerentanan hukum anak-anak *stateless* menjadi tantangan tersendiri dalam merancang program pendidikan yang berkelanjutan. Meski demikian, semangat untuk terus hadir bagi mereka yang terpinggirkan membuat KBRI dan Atdikbud tetap konsisten mencari jalan.

Pendidikan yang diberikan kepada *stateless child* tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk memanusiakan. Di balik setiap cerita hidup mereka, tersimpan harapan dan perjuangan yang tak terlihat oleh pandangan umum. Meskipun lahir tanpa status hukum, mereka tetap memiliki semangat untuk tumbuh dan bermimpi. Melalui kebijakan pendidikan yang inklusif, negara menunjukkan keberpihakan yang nyata dan penuh empati. Bahwa setiap anak, siapa pun dia dan di mana pun ia berada, berhak untuk belajar, berkembang, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya.

2. Pendidikan Nonformal sebagai Alternatif untuk Stateless Child

Pendidikan nonformal merupakan wajah lain dari pendidikan yang lebih terbuka dan manusiawi. Berbeda dengan sistem formal yang terikat aturan administratif yang kaku, pendidikan nonformal menawarkan ruang yang fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan riil peserta didik. Menurut Wahyu, pendidikan nonformal memiliki keunggulan dalam fleksibilitas kurikulum, waktu pelaksanaan, serta metode pengajaran yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kemampuan peserta didik (Adolph, 2018). Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks anak-anak *stateless* yang tidak memiliki akses ke sekolah formal karena kendala dokumen kewarganegaraan.

Pendidikan nonformal tidak hanya mengajarkan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mengasah karakter, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat untuk terus belajar meskipun dalam kondisi serba terbatas. Program seperti kelas *calistung* di Malaysia menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan nonformal mampu mengisi kekosongan yang tidak bisa dijangkau oleh sistem pendidikan formal. Di ruang-ruang sederhana itu, pendidikan kembali pada makna sejatinya: membebaskan, memberdayakan, dan menghidupkan harapan.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan nonformal sering kali didukung oleh para relawan pengajar yang memiliki kepedulian tinggi terhadap hak pendidikan anak-anak marginal. Kehadiran para relawan ini menjadi kekuatan utama dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan nonformal bukan sekadar alternatif, tetapi juga wujud nyata dari upaya menciptakan keadilan sosial dalam dunia pendidikan.

3. Literasi Dasar Sebagai Pendidikan Dasar

Literasi dasar merupakan jantung dari setiap proses pendidikan. Ia bukan sekadar kemampuan teknis untuk membaca, menulis, dan berhitung (calistung), melainkan keterampilan hidup yang menjadi fondasi dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia. Menurut Mardianto, literasi adalah kemampuan mendasar yang memungkinkan seseorang untuk tidak hanya memahami informasi, tetapi juga menggunakannya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari (Lubis, Mardianto, & Nasution, 2023). Literasi, dalam arti yang lebih luas, merupakan alat untuk membangun pemahaman, memberdayakan diri, serta mengambil keputusan yang bijak di tengah kompleksitas sosial dan budaya.

Dalam konteks anak-anak tanpa kewarganegaraan (*stateless child*), literasi dasar memiliki peran yang lebih mendalam dan vital. Bagi mereka, literasi bukan hanya pintu menuju pendidikan formal, melainkan jendela harapan untuk kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Ketika akses terhadap pendidikan formal dibatasi oleh status hukum yang tidak mereka pilih, maka keterampilan literasi menjadi satu-satunya jalan untuk mempertahankan martabat sebagai manusia yang utuh dan berdaya. Literasi dasar juga tidak bersifat tunggal, tetapi terdiri dari beberapa dimensi yang saling melengkapi, yaitu :

- a. Literasi Fungsional : kemampuan menggunakan keterampilan dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari
- b. Literasi Informasi : kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan cerdas
- c. Literasi Digital : menjadi semakin penting dalam dunia yang serba terhubung, di mana anak-anak perlu memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital sebagai sarana belajar dan berkomunikasi

Ketiga dimensi ini, jika dipadukan, akan membentuk generasi yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian hidup.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan nonformal bagi *stateless child* di Malaysia, khususnya dalam program literasi dasar yang diselenggarakan oleh Sanggar Bimbingan Sungai Mulia di bawah koordinasi KBRI dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap fenomena sosial dan kebijakan yang diterapkan, serta menggali pengalaman langsung dari subjek penelitian (Adolph, 2018). Studi kasus merupakan metode yang tepat digunakan dalam penelitian kebijakan karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pendidikan nonformal bagi anak-anak tanpa kewarganegaraan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan tenaga pendidik dan pengelola program untuk menggali strategi,

tantangan, dan dampak pembelajaran. Observasi langsung dilakukan untuk mencermati proses interaksi belajar serta efektivitas metode dan media pengajaran. Studi dokumentasi melengkapi data dengan menelaah kebijakan, kurikulum, dan dokumen administratif terkait. Proses pengajaran ini turut diperkuat oleh kehadiran mahasiswa (KKN) dari berbagai daerah di Indonesia yang terlibat aktif mendampingi pembelajaran, dengan tujuan yang sama, yaitu mendukung terciptanya literasi dasar bagi anak-anak *stateless child*. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), melalui proses reduksi, kategorisasi tematik, dan interpretasi yang dikaitkan dengan teori serta kerangka kebijakan pendidikan bagi kelompok rentan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia, yang beralamat di Jalan 50, Lorong Sungai Mulia 5, Kampung Sungai Mulia. Sanggar ini dipilih karena merupakan pionir pendidikan nonformal bagi anak-anak *stateless* di Malaysia sejak berdiri pada tahun 2019, sekaligus menjadi sanggar dengan jumlah peserta didik terbanyak, yakni 176 anak. Keberadaan SBSM sebagai ruang belajar yang representatif menjadikannya locus ideal untuk memahami implementasi nyata kebijakan pendidikan dalam mendampingi kelompok yang terpinggirkan. Subjek penelitian mencakup tiga kelompok utama: tenaga pendidik, peserta didik, serta pengelola sanggar yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan KBRI bagi *stateless child* dapat Menumbuhkan Kembangkan Literasi Dasar pada Sanggar Bimbingan Sungai Mulia Malaysia

Implementasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, khususnya melalui Sanggar Bimbingan Sungai Mulia, *stateless child* yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal karena status hukum yang tidak jelas, mendapatkan akses pendidikan melalui pendekatan nonformal yang inklusif dan bermakna. Program literasi dasar yang diterapkan, meliputi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*), bukan hanya sebagai bentuk penyampaian materi akademik, tetapi juga sebagai proses membangun kepercayaan diri dan jati diri anak-anak tersebut.

Program *calistung* (membaca, menulis, dan menghitung) yang diterapkan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia dirancang secara fleksibel dan tidak berpatokan pada usia anak. Di SBSM setiap anak diperlakukan berdasarkan kemampuan, bukan umur. Misalnya, meskipun secara usia mereka sudah seharusnya berada di kelas lima sekolah dasar, jika mereka masih belum menguasai kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, maka mereka tetap akan mengikuti kelas *calistung*. Anak-anak akan terus belajar di kelas ini hingga mereka dinyatakan mampu mengikuti ujian kenaikan kelas. Ujian tersebut menjadi tolak ukur untuk menilai apakah mereka sudah siap melanjutkan ke jenjang kelas yang sesuai dengan usia mereka, atau masih perlu waktu untuk memperkuat dasar literasi mereka sebelum melangkah lebih jauh.

Sanggar yang berada di Malaysia sangat bergantung pada kehadiran para relawan pengajar, seperti mahasiswa yang sedang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kehadiran mereka menjadi sumber daya penting yang membantu jalannya proses pembelajaran, khususnya dalam mendampingi siswa-siswa di kelas reguler, dari kelas satu hingga kelas enam. Meskipun kegiatan belajar dilakukan secara nonformal, setiap kelas tetap diawasi dan dibimbing oleh pengelola

program hingga tenaga pengajar yang sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kolaborasi antara guru tetap dan relawan inilah yang menciptakan suasana belajar yang efektif, penuh semangat, dan menyentuh hati, karena setiap anak diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai kemampuannya tanpa tekanan, tetapi dengan kasih dan pendampingan yang tulus.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia. Tidak hanya hadir sebagai pemegang kebijakan, keduanya juga terlibat langsung dalam melengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran. Mulai dari penyediaan meja dan kursi, alat tulis, hingga buku pelajaran, semua diberikan untuk menciptakan suasana belajar yang layak dan nyaman. Tak hanya itu, KBRI dan Atdikbud juga membantu dalam pengurusan dokumen penting anak-anak, seperti ijazah dan paspor sementara, yang menjadi bukti administratif dan legal bagi keberadaan mereka sebagai peserta didik.

Lebih dari itu, KBRI dan pengelola sanggar juga menekankan pentingnya pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang aman bagi setiap anak. Seperti yang dikatakan oleh pendiri sanggar (Ibu Mimin, 51 tahun), bahwa :

“Kami ingin sanggar ini jadi tempat yang aman dan penuh kasih, bukan sekadar ruang belajar. Anak-anak harus merasa diterima dan dihargai. Kalau ada yang membully, kami tegur langsung. Karena kami percaya, hanya di lingkungan yang penuh empati, anak-anak bisa tumbuh dengan percaya diri”

Hasil wawancara Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian khusus adalah larangan keras terhadap segala bentuk tindakan perundungan (bullying) di lingkungan sanggar. Setiap peserta didik diimbau untuk saling menghargai, menyayangi, dan mendukung satu sama lain. Jika terdapat tindakan bullying, pihak sanggar akan memberikan teguran langsung secara pribadi kepada pelaku, dan dalam kasus yang lebih serius, orang tua atau wali anak tersebut juga akan dipanggil untuk diberi pemahaman serta peringatan keras. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan penuh empati, sehingga anak-anak dapat tumbuh tanpa rasa takut dan dengan rasa percaya diri yang kuat. Sesuai dengan yang disampaikan pendiri Sanggar Bimbingan Sungai Mulia.

Fasilitas yang disediakan pun mengikuti standar pendidikan nasional Indonesia, sehingga anak-anak yang belajar di sanggar ini tetap memperoleh pengalaman belajar yang sepadan dengan anak-anak di sekolah formal di tanah air. Bahkan, keberadaan sanggar sendiri tidak akan diakui jika tidak mendapatkan izin atau dukungan resmi dari KBRI dan Atdikbud. Artinya, setiap sanggar yang berdiri harus melalui proses legalitas dan pemantauan, agar kualitas pendidikan yang diberikan benar-benar terjamin dan sesuai dengan visi perlindungan serta pemberdayaan warga negara Indonesia di luar negeri. Peran inilah yang menjadikan KBRI dan Atdikbud bukan sekadar lembaga administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa hak anak-anak untuk belajar tetap terlindungi, kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua orang peserta didik di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia (SBSM), sesuai dengan pendapat diperoleh informasi bahwa implementasi kebijakan pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh KBRI dan Atdikbud

dirasakan secara langsung oleh para peserta didik dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi dasar anak-anak tanpa kewarganegaraan (*stateless child*).

Seperti yang dikatakan peserta didik dari kelas 4 SD namun sebelumnya mengikuti kelas calistung, (Maysarah, 10 tahun) beliau mengatakan :

“Dari umur 8 tahun saya sekolah di SBSM Awalnya saya kesulitan membaca dan menghitung, tapi program calistung dari KBRI sangat membantu. Mereka juga sering kirim buku dan meja baru, jadi saya semangat belajar. Sekarang saya sudah kelas 4, belajar makin mudah karena sering diajar kakak-kakak KKN yang cara ngajarnya seru dan menyenangkan. Saya juga bersyukur karena dibantu punya dokumen seperti paspor sementara. “

Hal yang sama juga disampaikan oleh peserta didik namun memiliki perbedaan tidak mengikuti kelas calistung, (Nayla, 10 tahun) beliau mengatakan :

“Saya langsung masuk kelas 1 karena sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung. Selama belajar di Sanggar, saya merasa senang karena KBRI sering bantu dengan fasilitas seperti meja, kursi, dan buku baru. Belajar jadi makin seru saat ada kakak KKN yang mengajar dengan cara menarik, jadi saya nggak bosan di kelas. Saya juga terbantu karena KBRI mempermudah saya punya dokumen, seperti paspor sementara”

Berdasarkan wawancara dengan dua peserta didik di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia, terlihat bahwa kebijakan pendidikan nonformal dari KBRI dan Atdikbud sangat dirasakan manfaatnya. Mereka merasakan langsung dampak positifnya, terutama dalam peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Fasilitas belajar yang memadai serta kehadiran guru, termasuk kakak KKN yang mengajar dengan cara menyenangkan, membuat suasana belajar jadi lebih nyaman dan efektif. Salah satu anak bahkan bercerita bahwa ia dulu berada di kelas calistung, namun berkat bimbingan intensif, kini ia sudah naik ke kelas 4. Lingkungan sanggar juga dinilai sangat mendukung, karena anak-anak merasa dihargai, dibimbing, dan diberi ruang untuk berkembang.

2. Strategi dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Literasi Dasar Stateless Child

Sanggar Bimbingan Sungai Mulia (SBSM) hadir tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang aman yang memberi kehangatan bagi anak-anak tanpa kewarganegaraan. Pendidikan di sanggar ini tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikososial dan emosional peserta didik. Banyak dari anak-anak ini hidup tanpa identitas hukum yang jelas, berasal dari keluarga yang tidak utuh, bahkan ada yang tanpa orang tua. Situasi ini membuat mereka rentan secara mental dan sosial. Karena itu, peran guru di sanggar menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya mengajar, tapi juga mendampingi dengan sabar dan kasih sayang, menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak merasa diterima dan didukung untuk tumbuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh salah satu guru tetap di SBSM (Ibu Rika, 37 tahun) mengenai setiap sesi pembelajaran dirancang dengan suasana yang ramah, menyenangkan, dan mengedepankan kenyamanan psikologis anak-anak.

“Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik karena setiap anak memiliki karakter dan emosi yang berbeda-beda, ada yang semangat belajar, tapi ada juga yang mudah bosan. Biasanya, kami memulai kegiatan dengan ice

breaking atau permainan agar anak-anak lebih fokus dan tidak jenuh. Saya juga rutin memberi tugas agar mereka tetap belajar di rumah, karena meningkatkan literasi anak tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga memerlukan peran aktif dari orang tu”

Dari wawancara dengan seorang guru, terungkap bahwa kegiatan seperti ice breaking dan permainan edukatif rutin dilakukan untuk menjaga semangat belajar anak. Metode ini bukan hanya untuk menghindari rasa bosan, tapi juga untuk membangun rasa percaya diri dan antusiasme. Pembelajaran di sanggar tidak hanya fokus pada pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan keterampilan sosial. Anak-anak diajarkan cara berinteraksi dengan baik, menghargai guru, bersikap sopan di lingkungan sekitar, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua, meskipun peran mereka kadang terbatas.

Pengelola sanggar (Ibu Mimin, 40 tahun) menjelaskan tentang salah satu metode pembelajaran unggulan yang digunakan, beliau mengatakan bahwa :

“Di sanggar ini, kami menggunakan pendekatan Worwold yang menghargai potensi unik setiap anak. Anak-anak bukan hanya pendengar tapi aktif dalam belajar, mereka bebas bertanya, berpendapat, dan berdialog dengan guru sebagai teman, bukan penguasa kelas. Kami menciptakan ruang belajar yang terbuka dan inklusif agar mereka merasa aman dan dihargai. Dengan cara ini, anak-anak belajar percaya diri, berpikir kritis, dan bekerja sama, meski sering menghadapi penolakan di luar sana”

Wawancara yang dilakukan oleh Mahasiwa KKN sebagai tenaga bantuan dalam mengajar (Ainun, 21 tahun) beliau mengatakan :

“Saya senang bisa mengajar di SBSM karena anak-anak di sini butuh dukungan, baik dari segi pendidikan maupun hobi mereka. Seperti anak-anak pada umumnya, mereka butuh alat bantu belajar yang menarik, seperti buku bergambar dan alat ajar berwarna agar tidak mudah bosan. Kami, mahasiswi KKN, berusaha menghadirkan program-program yang kreatif dan menyenangkan untuk menciptakan suasana belajar yang segar dan menarik.”

Hasil wawancara dengan pendiri sanggar dan salah satu mahasiswi KKN menunjukkan bahwa proses pembelajaran di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia dirancang dengan penuh empati dan perhatian terhadap keunikan setiap anak. Dengan pendekatan *Worwold*, anak-anak diposisikan sebagai subjek aktif dalam belajar dan mereka didorong untuk bertanya, berpendapat, dan berdiskusi secara terbuka dalam suasana kelas yang inklusif dan aman. Mahasiswi KKN pun turut memperkuat pendekatan ini dengan menghadirkan metode belajar yang kreatif dan menyenangkan, seperti permainan edukatif dan tugas rumah, untuk menyesuaikan dengan karakter anak-anak yang beragam. Kolaborasi antara pendidik dan relawan ini menciptakan pengalaman belajar yang bukan hanya membentuk kemampuan akademik, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, keterampilan sosial, dan semangat belajar yang berkelanjutan.

Wawancara dengan dua peserta didik SBSM juga memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan di sanggar. Sebagai bagian dari mahasiswa yang mengikuti **Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional di Malaysia**, peneliti berkesempatan terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pengamatan interaksi anak-anak selama proses belajar berlangsung. Pengalaman ini memberikan perspektif mendalam terhadap respons peserta didik atas metode yang digunakan, khususnya pendekatan

pembelajaran berbasis permainan dan ice breaking. Seperti yang dikatakan oleh peserta didik (Maysarah, 10 tahun), bahwa :

“saya sangat senang ketika sebelum belajar melakukan ice breaking karena menjadi ketawa bersama teman dan menjadi semangat belajar dan rasanya seperti belajar dan sambil bermain. Kami juga melakukan ice breaking yang berbeda jadi selalu merasakan suasana yang baru dan berbeda”

Pengalaman Maysarah menunjukkan bahwa kegiatan ice breaking yang diterapkan sebelum pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai pemanasan, tetapi juga berkontribusi besar dalam menciptakan suasana yang menyenangkan, interaktif, dan mengurangi kejenuhan siswa. Peneliti yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga mengamati bahwa variasi ice breaking yang diterapkan mendorong anak-anak untuk lebih percaya diri, fokus, serta siap menerima materi pembelajaran dengan antusias. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada materi, tetapi juga pada kondisi emosional dan psikologis peserta didik.

Tambahan hasil wawancara dengan narasumber dari peserta didik lainnya yaitu (Nayla, 10 tahun), bahwa :

“Saya senang belajar di sanggar karena banyak kegiatan seperti games dan ice breaking yang melatih keberanian saya untuk berbicara di depan kelas. Awalnya saya, dan juga banyak teman lainnya, merasa takut bicara di depan umum. Tapi berkat bimbingan guru dan kakak KKN, perlahan kami jadi lebih percaya diri dan berani untuk tampil dan berbicara di depan orang banyak.”

Wawancara dengan dua peserta didik SBSM menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran di sanggar terasa menyenangkan dan efektif. Kehadiran ice breaking dan permainan edukatif membuat suasana belajar jadi lebih hidup. Guru dan kakak KKN pun dinilai ramah dan selalu siap membantu. Salah satu anak bahkan merasa lebih percaya diri setelah sering diberi kesempatan berbicara di depan kelas. Mereka juga merasa nyaman karena bisa langsung bertanya saat mengalami kesulitan, sehingga proses belajar jadi lebih mudah dipahami.

Di balik segala upaya yang dilakukan, dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pendidikan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia. Mulai dari pelatihan guru, penyediaan alat bantu belajar, hingga bantuan dalam pengurusan dokumen seperti paspor sementara dan ijazah, semua dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pengakuan atas hak pendidikan anak-anak tanpa kewarganegaraan. Setiap langkah ini saling terhubung dalam satu sistem yang saling menguatkan. Di tengah berbagai keterbatasan dan ketidakpastian, SBSM hadir sebagai harapan yang membuktikan bahwa setiap anak, siapa pun mereka, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, penuh makna, dan memantapkan.

3. Tantangan dan Upaya dalam Implementasi Program Literasi Dasar

Dalam pelaksanaannya, program literasi dasar di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menuntut kesabaran, ketekunan, dan komitmen tinggi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga pengajar profesional, khususnya dalam mendampingi kelompok rentan seperti anak-anak tanpa kewarganegaraan (*stateless child*). Meski demikian, kehadiran para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Malaysia menjadi solusi penting atas kekosongan tersebut. Dengan semangat sukarela

dan kepedulian yang tulus, mereka mengambil peran sebagai pendidik paruh waktu, tidak hanya mengisi kekurangan sumber daya, tetapi juga menunjukkan bahwa solidaritas lintas batas mampu menjadi kekuatan transformatif. Keterlibatan ini membuktikan bahwa ketika pendidikan dijalankan dengan hati dan rasa tanggung jawab sosial, ia mampu menjadi jembatan perubahan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem.

Selain kendala tenaga pengajar, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi persoalan yang cukup besar. Fasilitas belajar yang tersedia masih sangat sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi standar ideal untuk menunjang proses pendidikan yang optimal. Lebih jauh lagi, tantangan administratif pun muncul, mengingat pendidikan nonformal seperti sanggar ini belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Malaysia. Kondisi ini tentu menjadi hambatan serius dalam menjamin keberlanjutan dan legitimasi program literasi yang telah berjalan.

Kendala lain yang sering muncul dalam pelaksanaan program pendidikan di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia adalah latar belakang sosial anak-anak yang cukup kompleks. Banyak di antara mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu memberikan perhatian penuh, baik karena kesibukan bekerja maupun keterbatasan ekonomi. Kondisi ini membuat anak-anak datang ke sanggar membawa berbagai beban psikologis, seperti rasa malu, rendah diri, bahkan perasaan terasing. Tidak jarang pula, *stateless child* mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari teman-temannya yang berasal dari keluarga lebih stabil, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam situasi seperti ini, peran guru menjadi sangat penting. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh penerimaan bagi setiap anak, tanpa memandang latar belakang mereka.

Seperti yang dikatakan oleh mahasiswa KKN (Ainun, 21 tahun), beliau mengatakan :

“Kami kerap menghadapi tantangan ketika anak dari keluarga harmonis membully teman yang berasal dari keluarga kurang lengkap. Kami selalu bersikap tegas dan mengajak mereka untuk saling mendukung seperti keluarga sendiri. Mengelola emosi anak, terutama di kelas calistung, juga sulit karena perbedaan kemampuan membuat pengelompokan kurang efektif. Ditambah kurangnya dukungan orang tua dalam mendampingi belajar di rumah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami.”

Selain permasalahan psikososial, aspek ekonomi juga menjadi tantangan signifikan dalam proses pembelajaran di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru, banyak anak mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan akibat keterbatasan finansial keluarga. Meski demikian, semangat orang tua untuk memastikan anak-anak mereka termasuk *stateless child* tetap dapat belajar dan meraih masa depan lebih baik, tidak pernah surut. Menanggapi hal ini, pihak sanggar menerapkan kebijakan keringanan pembayaran dengan memberikan kesempatan mencicil dan kelonggaran waktu hingga empat bulan bahkan ketika masih dalam keadaan belu melunasi mereka masih mampu mengikuti kelas seperti biasanya. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen sanggar dalam mendukung pendidikan inklusif yang tidak membatasi akses hanya karena kendala ekonomi, sekaligus melengkapi upaya mengatasi tantangan psikososial yang telah dihadapi.

Seperti yang dikatakan peserta didik Sanggar Sungai Bimbingan (Maysarah, 10 tahun), beliau mengatakan :

“Saya kadang kesulitan memahami materi baru, terutama karena di rumah tidak ada yang bisa membantu karena orang tua sibuk bekerja. Namun, saya merasa terbantu sekali karena guru-guru dan ibu KKN selalu sabar menjelaskan hingga saya paham. Cara mereka yang ramah dan penuh canda membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan”.

Hal yang serupa juga disampaikan dari peserta didik lain (Nayla, 10 tahun) beliau mengatakan bahwa :

“Saya merasa senang belajar di sanggar karena diajarkan sikap sopan dan baik terhadap teman maupun orang tua. Namun, di luar sanggar saya kadang kesulitan beradaptasi dengan teman yang kurang menjaga sikap. Untuk belajar, saya selalu mendapat dukungan dari orang tua, dan ketika mereka sibuk, saya berusaha belajar sendiri. Jika masih belum paham, saya selalu bisa bertanya kepada guru atau kakak KKN yang dengan sabar membantu saya.”

Pernyataan Nayla menggarisbawahi pentingnya pendidikan karakter dalam lingkungan belajar yang mendukung. Melalui pengalaman peneliti sebagai mahasiswa KKN yang terlibat langsung dalam proses pendampingan pembelajaran di sanggar, terlihat bahwa anak-anak tidak hanya diajarkan literasi akademik, tetapi juga nilai-nilai sosial seperti kesopanan, saling menghargai, dan empati. Peneliti turut mengamati bagaimana anak-anak seperti Nayla belajar membangun kemandirian saat menghadapi keterbatasan dukungan di rumah, serta memanfaatkan akses kepada relawan pengajar untuk memahami materi pelajaran secara lebih baik. Hal ini mencerminkan bahwa dukungan emosional dan kehadiran tenaga pendamping yang sabar sangat membantu *stateless child* dalam menyesuaikan diri, baik secara akademik maupun sosial.

Pelaksanaan program literasi dasar di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia (SBSM) masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan peserta didik dalam memahami materi baru terutama saat tidak ada pendamping di rumah akibat kesibukan orang tua. Selain itu, nilai-nilai kedisiplinan dan sikap baik yang diajarkan di sanggar belum sepenuhnya tercermin saat mereka berada di luar lingkungan sekolah. Namun, para peserta didik sangat terbantu oleh bimbingan guru dan tenaga pengajar KKN yang sabar, ramah, serta memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan dan kesempatan bertanya. Dukungan tersebut membuat mereka merasa nyaman dan termotivasi untuk terus belajar, memperbaiki diri, serta meningkatkan rasa percaya diri, sehingga menjadi pelengkap dalam mengatasi tantangan psikososial dan ekonomi yang sebelumnya telah diidentifikasi.

Hal yang sama juga disampaikan pemilik Sanggar Sungai Bimbingan (Ibu Mimin, 53 tahun), beliau mengatakan:

“Pada awal pendirian sanggar, kami menghadapi tantangan besar karena masih banyak masyarakat yang kurang setuju, terutama karena peserta didik adalah anak-anak tanpa kewarganegaraan dan terkadang menimbulkan keributan. Masyarakat juga khawatir akan keselamatan anak-anak saat pulang sekolah. Namun, seiring waktu, sikap masyarakat berubah karena anak-anak diajarkan nilai-nilai agama yang baik, bahkan beberapa di antaranya dipercaya untuk mengumandangkan azan di Surau. Kami selalu mengingatkan peserta didik untuk menjaga sikap demi keberlangsungan sanggar agar mereka bisa terus bersekolah”

Hasil wawancara dari pemilik sanggar menyatakan bahwa Selain tantangan dari masyarakat yang awalnya meragukan keberadaan sanggar, pihak pengelola juga menghadapi respons terkait kebisingan selama kegiatan belajar yang dianggap mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Untuk menjaga hubungan harmonis, sanggar bersama pengajar menyusun aturan yang memungkinkan anak-anak berekspresi secara bebas namun tetap menghormati ketertiban dan kenyamanan warga. Melalui edukasi perlahan, anak-anak diajarkan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan etika sosial. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik sosial secara damai, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan yang esensial bagi peserta didik.

Tambahan hasil wawancara yang diberikan oleh pemilik sanggar (Ibu Mimin, 53 tahun) tentang kendala dalam administrasi, beliau mengatakan bahwa :

“Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah banyak peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga terlambat melunasi uang sekolah. Kami memberikan keringanan berupa cicilan dengan batas waktu maksimal empat bulan. Namun, kami tetap tegas bahwa siswa yang belum melunasi tidak diperbolehkan mengikuti ujian kenaikan kelas, sehingga orang tua termotivasi untuk menyelesaikan pembayaran agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan.”

Salah satu aspek yang patut diapresiasi dari Sanggar Bimbingan Sungai Mulia adalah komitmennya dalam menjunjung prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam proses pendidikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyelesaian administrasi keuangan, sanggar tidak membedakan perlakuan terhadap peserta didik. Baik anak yang telah melunasi biaya pendidikan maupun yang belum, tetap memperoleh hak yang sama dalam mengakses fasilitas dan mengikuti pembelajaran. Kebijakan ini tidak hanya menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak tanpa diskriminasi, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan yang mendalam, melengkapi upaya sanggar dalam mengatasi berbagai tantangan psikososial dan ekonomi yang dihadapi peserta didik.

Namun, di tengah segala keterbatasan yang ada, upaya untuk mengatasi berbagai tantangan tidak pernah berhenti dilakukan. Para guru di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia dengan penuh kesabaran dan dedikasi terus menjalin komunikasi yang intensif dengan keluarga peserta didik, meski mereka memahami bahwa tidak semua orang tua memiliki banyak waktu luang. Mereka berusaha membangun relasi yang hangat, tidak hanya dengan anak-anak, tetapi juga dengan keluarganya, guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif dan harmonis. Dalam proses pengajaran, guru-guru pun selalu berupaya menyesuaikan metode ajar agar lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi anak-anak. Pendekatan yang kreatif, interaktif, dan penuh empati menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap anak, dengan segala keterbatasan yang mereka bawa, tetap mampu berkembang dan merasa dihargai di dalam kelas.

Keberhasilan program literasi dasar di Sanggar Bimbingan Sungai Mulia didukung oleh kolaborasi antara relawan pengajar, mahasiswa KKN, serta dukungan dari berbagai organisasi lokal dan internasional. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan tenaga pengajar, sarana prasarana yang minim, serta belum adanya pengakuan resmi dari pemerintah Malaysia terhadap lembaga pendidikan nonformal ini (UNICEF, 2022). Meski demikian, keberadaan

program ini telah memberikan harapan baru bagi ratusan *stateless child* untuk memperoleh keterampilan literasi dasar yang menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian besar anak yang mengikuti program literasi dasar menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan membaca dan menulis setelah mengikuti kelas selama minimal satu tahun ajaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan nonformal oleh KBRI melalui Sanggar Bimbingan Sungai Mulia terbukti dapat menumbuhkembangkan literasi dasar pada anak-anak tanpa kewarganegaraan di Malaysia, sekaligus mendukung upaya pencapaian SDGs di bidang pendidikan.

F. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan nonformal oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) melalui Sanggar Bimbingan Sungai Mulia di Malaysia telah memberikan dampak yang signifikan dalam menumbuhkan literasi dasar pada anak-anak tanpa kewarganegaraan (*stateless child*). Program pendidikan yang diterapkan bersifat fleksibel dan inklusif, tidak hanya memberikan akses terhadap kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*), tetapi juga turut memperkuat karakter, rasa percaya diri, dan keterampilan sosial peserta didik. Salah satu strategi utama yang diterapkan dalam proses pembelajaran adalah penggunaan pendekatan berbasis empati dan metode *Worwold*, yang menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam kegiatan belajar. Pembelajaran dirancang dengan nuansa menyenangkan dan terbuka, melalui media visual seperti buku bergambar dan alat ajar edukatif, serta diselingi dengan kegiatan permainan dan *ice breaking* yang mampu meningkatkan motivasi dan fokus anak-anak.

Dukungan dari para relawan, termasuk mahasiswa KKN, juga menjadi bagian penting dari strategi pembelajaran, karena mereka mampu menciptakan suasana belajar yang lebih dekat, komunikatif, dan personal, sehingga anak-anak lebih mudah memahami materi. Selain itu, pendekatan humanistik yang diterapkan di sanggar turut menanamkan nilai-nilai karakter seperti sopan santun, keberanian berbicara, serta sikap saling menghargai, yang menjadi bekal penting dalam membentuk jati diri anak-anak tanpa kewarganegaraan di tengah lingkungan sosial yang sering kali menantang. Seluruh strategi tersebut saling bersinergi dalam membentuk ruang belajar yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan terhadap potensi setiap individu.

Implikasi praktis dari penelitian ini mendorong lembaga pendidikan nonformal, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih adaptif dan berbasis empati. Strategi seperti pendekatan metode *Worwold*, penggunaan media ajar visual, dan integrasi kegiatan permainan edukatif terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman anak-anak. Selain itu, praktik pengelolaan kebijakan pendidikan yang memanusiakan anak-anak tanpa identitas hukum dapat menjadi model replikasi bagi wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Untuk arah penelitian masa depan, studi ini membuka ruang eksplorasi lebih lanjut terhadap efektivitas kebijakan literasi dasar bagi *stateless child* di berbagai lokasi atau negara lain dengan pendekatan perbandingan dan analisis longitudinal. Diperlukan pula kajian lebih mendalam mengenai peran teknologi digital dan media informasi dalam menunjang literasi anak-anak marginal,

serta strategi advokasi kebijakan agar pendidikan nonformal memperoleh pengakuan legal yang lebih kuat dari negara tuan rumah. Dengan demikian, pendidikan nonformal bukan hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi konkret dan humanis dalam menjawab persoalan pendidikan bagi kelompok anak-anak yang terpinggirkan, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen negara terhadap keadilan sosial dan inklusi pendidikan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2018). Modul Manajemen Pendidikan non Formal.
- Aranda, R. J., & Nurhilmiliah. (2024). Tanggung Jawab Kedutaan Republik dalam Mengakomodasi Pendidikan Anak Jawab Pekerja Besar Migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 13544-13552.
- Asia-pacific, T. M. F. O. R. (n.d.). *Systematic Monitoring of Education For All Training Modules For Asia*.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Kebijakan KBRI Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Imigran di Malaysia, 6.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Guidance, S., Mulia, S., & Gombak, S. (2024). Eksistensi Sanggar Bimbingan Sungai Mulia 5 Dalam Pemberian Materi Pendidikan Agama Islam Pada Anak Pekerja Imigran Indonesia di Malaysia, 09.
- Guiraudon, V. (2005). European Court of Justice. *Immigration and Asylum [3 Volumes]: From 1900 to the Present [3 Volumes]*, 1(October), 217-219. <https://doi.org/10.54648/ecta2007029>
- HAM, K. (2016). Tujuan 16 : Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan , menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif , akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan Target Nasional terkait Perdamaian dan Kea. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, 1-9.
- Harahap, S. N. H., & Nurhilmiliah, N. (2024). Status Kewarganegaraan Pelajar Keturunan Indonesia di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu, Malaysia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 4(3), 1787-1798. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.2068>
- Lubis, P., Mardianto, M., & Nasution, M. I. P. (2023). Gerakan Literasi Sekolah: Tantangan Literasi Di Era Digital Dan Cara Mengatasinya. *Jurnal Media Infotama*, 19(2), 487-496. <https://doi.org/10.37676/jmi.v19i2.4399>
- Mohd Azhar, A. H., Muhammed Fauzi, O., & Othman, A. K. (2003). Pendidikan Bukan Formal (PBF) di Malaysia: Cabaran Dan Hala Tuju Wawasan 2020. *Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan*, 101-127. Retrieved from http://eprints.utm.my/2287/1/PENDIDIKAN_BUKAN_FORMAL_DI_MALAYSIA.pdf
- Rachmat, A. N. (2024). Penanaman Nasionalisme Kepada Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 5(2), 349-355. <https://doi.org/10.26874/jakw.v5i2.425>
- Rozi, F., Abda, Y., & Salsabilla, T. (2024). *Strategi Pendidikan Karakter untuk Siswa Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Tujuan SDG 4 : Pendidikan Berkualitas*.
- Sopyan, Y. (2021). Access To Justice of Citizenship Rights for Stateless Indonesian Migrant Workers' Children In Sarawak, Malaysia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 476-502.

<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5285>

- SUHAKAM Malaysia. (2024). Policy Brief Education for Refugees and Stateless Children, 1–17.
- Ummah, M. S. (2019). Peran Pustakawan pada Layanan Referensi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- UNESCO. (2022). Non-state actors in education. *Global Education Monitoring Report*, 1–577. Retrieved from https://en.unesco.org/gem-report/non-state_actors
- Wahab, A., Johari, H. I., Ismail, H., & Dwi, M. (2024). Pengabdian masyarakat internasional : literasi dan numerasi untuk anak TKI di Malaysia : upaya pengembangan potensi akademik di lingkungan migran, 8(September), 2942–2948.
- Hasanah, U., & Silitonga, S. (2020). Peran KBRI dalam perlindungan pendidikan anak migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(2), 134–150.
- Rozi, Abda, & Salsabilla. (2024). Implementasi pendidikan nonformal untuk anak migran di Malaysia. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 19(1), 45–60.
- UNHCR. (2021). Statelessness and citizenship. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
- UNHCR. (2023). Malaysia: Figures at a glance. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
- UNICEF. (2022). Education for stateless children in Malaysia. Kuala Lumpur: United Nations Children's Fund.

This page has been intentionally left blank.